

## DAFTAR REFERENSI

- Agoes, Soekrisno. (2013) *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik* Edisi Ketiga; Jilid 1. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Arens, A.A., Elder, R.J., Beasley, M.S., & Jusuf, A.A. (2013) *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Danang Suntoyo. (2016). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta : Refika Aditama.
- Halim, Abdul. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- . (2007). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- . 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi VI. Jakarta: Salemba Empat.
- . (2014) *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Heriningsih, Suchyo. (2014). “*Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pada Kab. dan Kota di Indonesia*”. Paradigma Vol. 18 Bulan September Tahun 2014.
- Ika, Siti Rochmah. 2012. *Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah*. Universitas Janabadra: Yogyakarta
- Kieso, Donal E., dkk. (2007). *Intermediate Accounting*. (Diterjemahkan Oleh: Emil Salim, SE). Jakarta: Erlangga.
- Khairuddin. (2013). Does Financial Performance of Local Government Influence on The Audit Agency Opinion. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4 (1) : 33-54.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Kuantitatif*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

----- . (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Dua. Yogyakarta :

UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*.

Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Mohammad Mahsun. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta :BPFE.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan BPK-RI No. 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rahardjo Adisasmita. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.

Riyanto, Agus Puji. (2015) *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Bandung: Pustaka Pelajar.

Rinaldy, Kamaludin, Sri Adji Prabawa, (2012). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kaur Sebelum dan Sesudah Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13 (1).

Rosmiaty Tarmizi, Khairudin, Ayu Jayadi, (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum dan Setelah Memperoleh Opini WTP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5 (2) : 71-90.

Yuni Wulan Dary, M. Rizal Yahya, (2016). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Pendapatan Asli Daerah Periode Opini Non WTP dan Periode Opini WTP. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1 (1) : 60-73.

Deris Tao Wibawa, Hasbuadin, Ruslin, Tuti Dahrmawati (2017). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini WTP dengan Opini WDP di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember, 2017*.

Suaedy, Soleh. (2011). *Mengejar Opini Wajar Tanpa Pengecualian*. Makalah disampaikan pada Diklat Pim tk.IV Manajemen Keuangan. Surabaya 20 Desember.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No, 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.

